

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
KUALA LUMPUR**

PENGUMUMAN

NO: 337/PEN/1017

1. KBRI Kuala Lumpur menerima banyak pertanyaan dan laporan dari masyarakat Indonesia mengenai kegiatan salah satu Ikatan/Perkumpulan/Panguyuban kemasyarakatan warga Indonesia, PERMAI, di Kuala Lumpur. Ikatan/Perkumpulan/Panguyuban tersebut telah melakukan kegiatan dan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama dengan *Malaysia Community Care Foundation / Yayasan Keprihatinan Komuniti Malaysia* (MCCF/YKKM) dalam suatu kegiatan Majelis Makan Malam Sempena sambutan hari Malaysia dan HUT Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2017 di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur.
2. Dilaporkan bahwa pada kegiatan tersebut terdapat penggunaan lambang KBRI Kuala Lumpur dan foto pejabat tinggi Indonesia (Menlu R.I dll), yang terkesan bahwa kegiatan tersebut telah mendapatkan dukungan dari KBRI Kuala Lumpur dan akan dihadiri oleh pejabat tinggi dimaksud.
3. Perlu ditegaskan bahwa, kegiatan dimaksud dilaksanakan tanpa dukungan dari KBRI Kuala Lumpur dan penggunaan lambang KBRI dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis kepada KBRI Kuala Lumpur.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, KBRI Kuala Lumpur menegaskan akan mengambil langkah-langkah hukum jika diperlukan dan kembali mengingatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar berhati-hati dengan segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan KBRI Kuala Lumpur untuk kepentingan pribadi/kelompok tertentu.
5. Mengenai adanya penandatanganan MoU antara Ikatan/Perkumpulan/Panguyuban tersebut dengan *Malaysia Community Care Foundation / Yayasan Keprihatinan Komuniti Malaysia* (MCCF/YKKM), KBRI Kuala Lumpur pernah mengeluarkan Pengumuman No. 276/PEN/0716 pada tanggal 19 Juli 2016 mengenai keberadaan dari MCCF/YKKM.
6. Pada pengumuman dimaksud, KBRI telah mengingatkan masyarakat Indonesia agar berhati-hati dengan segala bentuk tawaran dengan janji-janji tertentu terkait penawaran penerbitan Kartu MCCF/YKKM. Keberadaan kartu dimaksud tidak diakui oleh Pemerintah Malaysia dan pemegang kartu tetap akan dikenakan hukum jika terbukti melanggar peraturan keimigrasian Malaysia.
7. KBRI Kuala Lumpur mengingatkan kembali kepada masyarakat Indonesia agar berhati-hati dengan segala bentuk tawaran dengan janji-janji tertentu yang ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi/kelompok tertentu. Jika terdapat WNI yang mengalami situasi tersebut di atas, agar segera melaporkannya kepada pihak berwajib di Malaysia dan KBRI Kuala Lumpur.

Kuala Lumpur, 24 Oktober 2017